

Kebangkitan Kepemimpinan Kelas Buruh di Indonesia

Kasus PT. Maspion Unit I, Sidoarjo – Jawa Timur¹

Je Seong JEON

(KISEAS: Korean Institute of Southeast Asian Studies)

Abstrak

Demokratisasi telah membawa perubahan yang berarti bagi gerakan buruh. Satu perubahan terkemuka terjadi di level perusahaan. Perlawanan buruh atau ‘unjuk rasa’ pada masa rezim Soeharto telah meluas menjadi ‘perlawanan tanpa organisasi’, sehingga para buruh tersebut tidak dapat membentuk perwakilan buruh di perusahaan. Dalam masa pasca Soeharto, yang terjadi adalah sebaliknya, yakni dibangunnya ‘perlawanan dengan organisasi’. Study ini menguji bagaimana demokratisasi telah mengubah gerakan buruh dari tingkat basis, melalui kasus Maspion Unit I. Perusahaan ini berlokasi di Sidoarjo yang merupakan daerah industri disamping Surabaya. Saya melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan serikat buruh Maspion, khususnya selama kerja lapangan yang berlangsung dari bulan Januari hingga Mei 2001. Berdasarkan data lapangan, study ini membuktikan telah munculnya kekuatan baru kepemimpinan kelas buruh dari serikat buruh di tingkat pabrik. Kebangkitan kepemimpinan kelas buruh dengan basis massa dan otonomi keuangan telah mempengaruhi pihak manajemen sehingga mengurangi kebiasaan desportisme di pabrik. Kepemimpinan buruh ini juga menunjukkan bahwa gerakan buruh yang dulunya berorientasi elit sedang dalam proses perubahan menuju ‘gerakan buruh berdasarkan kelas buruh’, meskipun kepemimpinan tersebut masih belum terkonsolidasi dan masih dalam upaya untuk menyatukan aliran.

I. Pendahuluan

Dalam studi tentang gerakan buruh Indonesia terjadi hal-hal yang berlawanan antara penelitian pada masa rezim Soeharto dan penelitian pada masa rezim pasca Soeharto.

¹ Paper ini dipresentasikan pada Simposium Internasional Keempat Jurnal Antropologi Indonesia: Indonesia in the Changing Global Context: Building Cooperation and Partnership. 12–15 Juli 2005, di Universitas Indonesia - Depok. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Ketua dan Para Pengurus PUK SPSI Maspion Unit I, khususnya Sugianto, Surono, Herry, Maryono. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan pada Poengky Indarti dan Sudarto - mantan aktifis Divisi Perburuhan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya - atas bantuan mereka yang luar biasa, mulai saya mengikuti penelitian di lapangan hingga saat ini.



Beberapa hasil studi yang dilakukan pada masa rezim Soeharto sangat menghargai kapasitas dan peran gerakan buruh bagi proses demokratisasi di Indonesia dengan alasan pembentukan kelas buruh (Hadiz 1993; 1994; 1997), aliansi kelas buruh dengan kelas menengah (Athreya 1998), dan pemogokan yang menekankan akuntabilitas (Kammen 1997). Tetapi beberapa penelitian (Hadiz 2001; 2002a; 2002b; Tornquist 2004) yang dilakukan pada masa rezim pasca Soeharto tidak lagi menghargai kapasitas dan peran gerakan buruh terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Penelitian-penelitian yang dilakukan pada masa rezim pasca Soeharto juga jarang memfokuskan pada gerakan buruh. Saya menduga bahwa tendensi studi seperti di atas tidak ada imbangannya. Mengenai kapasitas gerakan buruh, pada masa rezim Soeharto para peneliti menduga terlalu berlebihan, sementara pada masa rezim pasca Soeharto justru meremehkan.

Agar dapat memahami fakta dan sumber daya yang menjadi dasar bagi gerakan buruh, Saya usul bahwa para peneliti perlu melakukan riset tentang gerakan buruh di tingkat pabrik. Meskipun jumlah pemogokan di pabrik meningkat di tahun 1990-an, akan tetapi unjuk rasa yang terjadi tersebut telah gagal membentuk organisasi buruh yang independent di tingkat pabrik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa unjuk rasa yang dilakukan buruh pada waktu itu adalah 'perlawanan tanpa organisasi'. Tetapi setelah tahun 1998, buruh-buruh pabrik yang melakukan unjuk rasa berhasil membentuk organisasi buruh yang independen dengan nama serikat buruh dan pekerja, sehingga hal ini bisa disebut sebagai 'perlawanan dengan organisasi', meskipun posisi tawar buruh tetap rendah karena krisis ekonomi. Oleh karena itu, kita harus melihat perkembangan gerakan buruh dari tingkat pabrik dan konteks situasi lokal. Hal itu bisa disebut sebagai pendekatan *bottom-up* dalam penelitian gerakan buruh.

Pada tahun 2000, saya telah melakukan riset terhadap 3 (tiga) kasus serikat buruh/serikat pekerja di tingkat pabrik di Surabaya dan Sidoarjo. Kasus-kasus tersebut adalah kasus PUK (Pengurus Unit Kerja) SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT. Maspion Unit I di Sidoarjo, kasus SP TSK (Serikat Pekerja Tekstil Sandan dan Kulit) PT. Victory Long Age (pabrik sepatu Reebok) dan kasus SBI (Serikat Buruh Independen) PT. Injaplast (pabrik karung plastik) di Surabaya. Diantara tiga kasus tersebut, hingga saat ini saya hanya dapat melanjutkan penelitian terhadap kasus Maspion karena SP TSK PT. Victory dan SBI PT. Injaplast terpaksa harus bubar karena perusahaan menutup usahanya dan mem-PHK buruh-buruhnya.

Dalam kasus Maspion, saya telah melakukan kerja lapangan pada bulan Juni-Juli 2000, Januari-Mei 2001, Januari 2003 dan April 2004 dengan menggunakan metode wawancara dan



pengamatan langsung di lapangan. Dalam tulisan ini, saya merumuskan tiga pertanyaan sebagai berikut: 1) Apa perbedaan pemogokan buruh pada masa Soeharto dan pasca-Soeharto? 2) Bagaimana cara buruh dalam melindungi organisasi? 3) Bagaimana cara buruh dalam melakukan konsolidasi organisasi? Dengan tiga pertanyaan tersebut, saya berharap dapat membantu memberikan gambaran tentang fakta dan sumber daya gerakan buruh Indonesia pada saat ini. Selanjutnya, saya berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi bahan bacaan bagi peneliti yang tertarik dengan masalah hubungan demokratisasi dan kaum buruh.

II. Perjuangan Buruh Maspion pada Tahun 1990-an

1. Maspion Grup dan Unit I

Manajemen Grup Maspion sangat bangga dengan hasil usahanya, yang disebutnya sebagai produk nasional “Prestasi Indonesia”. Maspion adalah singkatan dari “Mengajak Anda Selalu Percaya Industri Olahan Nasional”. Grup Maspion termasuk 100 kelompok perusahaan nasional berskala besar yang terdiri dari 53 perusahaan dan mempunyai 50 buah pabrik di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Usaha Grup Maspion dirintis pada tahun 1965 oleh Alim Husin - seorang Tionghoa Indonesia – yang mendirikan pabrik peralatan rumah tangga (lampu teplok) di Surabaya dengan nama U.D. Logam Jawa dan mempekerjakan 8 orang buruh. Usaha kecil ini berkembang menjadi Maspion pada tahun 1972 setelah keempat anak Alim Husin, termasuk Alim Markus selaku anak sulung dan Alim Satria selaku anak ketiga, ikut bergabung dalam bisnis Ayahnya.

Setelah tahun 1985, ekspor produk Maspion terus meningkat. Pada tahun 1992 mereka berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 140 milyar rupiah. Maspion kemudian menjadi simbol kesuksesan bagi perusahaan nasional dalam melakukan ekspor, sekaligus menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung usaha pembangunan pemerintah (*Surya* Juni 10; Agustus 12, 1993). Pada tahun 1997 ekspor Maspion agak menurun akibat terjadinya krisis ekonomi, tetapi secara mengagumkan pada 1998 meningkat lagi hingga mencapai US\$ 110 juta (*Surya* April 22, 2000; *Surabaya Post* Maret 17, 2001). Negara tujuan ekspor Maspion adalah Amerika Serikat (20%) dan Jepang (20%), sedangkan sisanya dikirim ke 37 negara lainnya (PT. Maspion n.d.).

Berdasarkan sukses yang telah diraih Maspion ini, Alim Markus selaku Presiden Direktur Maspion diangkat menjadi Konsul Kehormatan Kanada oleh Pemerintah Kanada tahun 1995



– 2004, dan pada tanggal 16 Desember 1999 hingga 16 Agustus 2000 diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid menjadi anggota Dewan Pemulihan Usaha Nasional (DPUN) berdasarkan surat Keputusan Presiden RI No. 165/1999.

Alasan sukses Maspion tidak hanya dengan cara memproduksi barang berdasarkan kepentingan pasar (PIBI n.d.: 218-19) dan peningkatan kualitas teknis dengan cara joint-venture dengan perusahaan AS, Jepang, Cina, Taiwan, Korea Selatan (CIC 1997: 1196; *Jawa Pos* Agustus 8, 2000), tetapi juga hasil melalui hasil kerja buruh-buruh Maspion. Pada tahun 2000, buruh Maspion berjumlah 23.000 orang, dengan prosentase 60% dari jumlah buruh adalah laki-laki. Tetapi prosentase ini berbeda antar Unit. Unit V di Gresik, misalnya, 90% dari jumlah seluruh buruh adalah laki-laki, tapi jumlah buruh laki-laki di Unit I Sidoarjo hanya 40%. Saat ini kebanyakan buruh Maspion adalah lulusan SMA (Berdasarkan hasil wawancara dengan Andy Chandra dan Rommy Ceha, Juli 20, 2000).

Saya memfokuskan penelitian pada pabrik-pabrik di Unit I yang berlokasi di Gedangan, Sidoarjo. Alasan saya adalah karena Unit I bukan hanya menjadi inti sejarah perusahaan maupun perputaran produksi Grup Maspion, tetapi juga merupakan tempat munculnya pemogokan buruh yang menjadi titik awal bagi demokratisasi PUK SPSI pada tahun 1998. Unit I ini terdiri dari tiga perusahaan, yaitu PT. Maspion, PT. Indal, PT. Alumindo. PT. Maspion adalah induk perusahaan dalam sejarah Grup Maspion, mempunyai 7.500 buruh, dan menjadi perusahaan terbesar di Grup Maspion. PT. Maspion mempunyai 8 divisi sebagai berikut: produk peralatan elektronik rumah tangga (AC, setrika, kipas angin), peralatan dapur (wajan, panci), plastik, traveling bag, polyfoam, logam dan PVC. PT. Indal yang berdiri pada tahun 1972 memproduksi bahan konstruksi aluminium. Sedangkan PT. Alumindo memproduksi logam aluminium seperti kertas aluminium (aluminium foil) dan bahan untuk koin Rp 100,- (PT. Maspion n.d.; Wawancara dengan Rommy Ceha Juni 20, 2000). Pemogokan terbesar dalam sejarah Maspion pada tahun 1998 berawal dari PT. Alumindo.

Untuk melakukan penelitian gerakan buruh Maspion, saya mendapatkan posisi yang sangat baik. Pemimpinan SPSI Maspion sangat terbuka pada saya karena saya mempunyai jaringan dengan Divisi Perburuhan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBHS) yang sudah saya mulai sejak Munir masih menjabat sebagai Kepala Divisi Perburuhan LBH Surabaya. Apalagi, perkenalan saya dengan Pimpinan SPSI Maspion melalui Poengky Indarti dan Sudarto, aktivis LBHS yang sangat dihormati oleh Pimpinan SPSI. Selanjutnya, pihak manajemen Maspion, seperti Andy Chandra dan Rommy Ceha juga mengizinkan saya melakukan penelitian dan mengantarkan saya meninjau tempat produksi dalam pabrik karena saya mempunyai Visa



Penelitian. Alim Markus sebagai Direktur Utama Maspion Grup juga mempersilahkan saya untuk melakukan penelitian di pabriknya melalui Sugianto yang menjadi Ketua PUK SPSI PT. Maspion.

Alim Markus hanya menilpon Sugianto dan menanyakan identitas saya. Setelah mendapat informasi mengenai saya dari Sugianto, Alim Markus kemudian mengatakan “tidak apa-apa” dan “welcome” karena saya adalah peneliti dari Korea bukan aktivis NGO (Wawancara dengan Sugianto pada bulan Juli 2000).

Oleh karena itu, saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi kantor PUK SPSI yang terletak di dalam lokasi pabrik, dan diperbolehkan berkeliling mengunjungi semua pabrik di Unit I bersama-sama dengan Pengurus SPSI. Saya juga dilibatkan dalam kegiatan sosial buruh, antara lain diundang menghadiri pesta pernikahan, halal bihalal, dll pada tahun 2001. Tentu saja hal tersebut sangat membantu penelitian saya. Saya dapat menikmati kondisi tersebut karena posisi tawar SPSI Maspion yang cukup tinggi pada saat itu dan antisipasi para pimpinannya. Saya akan memasukkan cerita tentang mereka ke dalam tulisan saya.

2. Mogok di Tahun 1993: Perlawanan tanpa Organisasi

“Prestasi Indonesia” dari Maspion juga merupakan hasil “eksploitasi yang berlebihan” dengan cara kondisi kerja yang buruk dan disiplin yang kejam terhadap buruh. Pada awal tahun 90-an pihak buruh mengatakan bahwa kondisi kerja Maspion paling buruk diantara pabrik-pabrik sekitarnya. Buruknya kondisi kerja dan kerasnya disiplin kerja di Maspion terungkap dalam keluhan-keluhan buruh Maspion, misalnya “jam kerja paling panjang, tapi gaji paling sedikit”, waktu istirahat hanya 15 menit per-hari, waktu sholat dilarang, lembur tidak boleh ditolak, ke toilet harus antri, membuat buruh perempuan “hampir pingsan”, “pokoknya banyak halangan”. Buruh diharapkan bekerja seperti “kerbau”. Manajemen selalu mengatakan “Kalau tidak suka, kamu keluar saja!”. Manajemen juga suka memaki buruh dengan “kata-kata kotor”. PUK SPSI waktu itu sudah ada, tetapi ketuanya adalah *Deputy Plant Manager* (wawancara dengan Sugianto, Juli 2000; Suroño, 3 Maret 2001).

Pada bulan Juli-Agustus 1993, terjadi unjuk rasa besar selama 17 hari di Unit I yang kondisi kerjanya sangat buruk tersebut. Kronologi singkatnya saya kutip dari berbagai harian, sebagai berikut (*Kompas* 28 Juli 1993; *Jawa Pos* 27 Juli 1993; *Memorandum* 27 Juli 1993; *Surya* 20, 21, 24, 25, 28 Juli dan 3 Agustus 1993; *Surabaya Post* 27, 29 Juli dan 3 Agustus 1993):



9 Juli: 5 orang buruh di-PHK karena dinilai kurang rajin bekerja di Divisi Teflon.
10-11 Juli: terjadi unjuk rasa di Teflon. Tuntutannya adalah agar personalia yang sewenang-wenang di-PHK.
19-20 Juli: Unjuk rasa di Divisi Stromking yang memproduksi lampu stromking.
20-24 Juli: Unjuk rasa di Divisi Elektro.
25-26 Juli: Unjuk rasa kembali lagi terjadi di Divisi Teflon. Ketika itu terjadi pemberontakan pertama yang akhirnya harus berhadapan dengan pihak kepolisian. Polisi menggunakan taktik menangkap satu orang yang berada di luar pabrik. Buruh Maspion terpancing taktik polisi, mereka menduga orang yang ditangkap itu buruh Maspion. Buruh kemudian melempari polisi dengan batu. Polisi membalas dengan menggunakan gas air mata dan anjing.
26 Juli 22:00: Tiba-tiba terjadi kebakaran di gudang elektronik dan plastik yang berasal dari *korsluiting* listik.
27 Juli – 2 Agustus: Keputusan Manajemen meliburkan 3.000 karyawan Unit I selama 7 hari.
3 – 7 Agustus: Buruh diminta kerja kembali, tetapi unjuk rasa terjadi lagi di Divisi Logam.

Unjuk rasa di Divisi Logam dapat saya ketahui dengan lebih jelas proses mogoknya karena saya mendapat kesempatan membaca berkas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengenai kasus pidana buruh pada saat terjadinya aksi unjuk rasa. Berdasarkan uraian fakta di dalam putusan tersebut, alasan unjuk rasa buruh adalah perlakuan manajer yang “sewenang-wenang” terhadap buruh. Beberapa buruh meminta agar pihak manajemen menghitung kembali gaji mereka, karena mereka menduga banyak perhitungan yang salah, sehingga sangat merugikan buruh. Tetapi pihak manajer menolak permintaan buruh. Oleh karena penolakan tersebut, maka buruh spontan melakukan unjuk rasa. Setelah terjadinya unjuk rasa, pada siang harinya perwakilan buruh yang akan melakukan negosiasi dengan pihak pengusaha juga terbentuk secara spontan. Mereka mengajukan 9 tuntutan kepada pihak pengusaha sebagai berikut:

- 1) Minta waktu sholat diperpanjang;
- 2) Minta premi produksi dengan cara penurunan target;
- 3) Perincian gaji harus memakai sistem komputer;
- 4) Memperingatkan pengawas yang tindakannya terlalu otoriter;
- 5) Minta kenaikan uang susu menjadi Rp. 350,-;



- 6) Minta keselamatan dan kesehatan kerja lebih diperhatikan;
 - 7) Penyesuaian Tunjangan Hari Raya/agar uang THR disamakan dengan bagian lain;
 - 8) Kesepakatan Kerja Bersama harus diketahui oleh semua karyawan;
 - 9) Minta agar Ketua SPSI Sub.Unit Logam dipilih oleh semua karyawan
- (Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Putusan No.104/PID/1995/PT.SBY).

Pada pagi hari kedua aksi mogok buruh, para wakil buruh menunggu untuk dapat bernegosiasi dengan Alim Markus. Sambil menunggu, mereka membaca tuntutan buruh dan seorang wakil buruh bernama Rudy Mulyanto, menyerukan pada para buruh: “Tolong bantu kami! Jangan membuat kerusakan! Kalau kalian membuat kerusakan berarti kalian membunuh saya!” (Suparman n.d.: 4). Tetapi ternyata Alim Markus tidak hadir ke tempat perundingan karena dia sedang ada tamu. Ketidakhadiran Alim Markus ini membuat buruh-buruh marah dan mereka kemudian mulai melempar batu, merusak kantor Divisi Logam dan 7 mobil. Polisi turun tangan dan menangkap 9 orang wakil buruh serta menjadikan kasus ini sebagai kasus pidana. Selanjutnya, pihak manajemen mem-PHK 23 buruh, termasuk 9 orang wakil buruh yang ditangkap polisi (*Surya* Agustus 5, 7, 8, 15, 18, 1993; *Surabaya Post* Agustus 6, 14, 1993).

Dengan cara kriminalisasi perwakilan buruh, pihak manajemen berhasil menghentikan aksi mogok buruh. Kasus pidana buruh ini disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo dan dibagi menjadi 2 perkara, perkara pertama melibatkan 9 orang buruh yang didakwa telah melakukan tindakan kriminal sehingga mengakibatkan rusaknya barang-barang di PT. Maspion. Perkara kedua melibatkan 14 buruh termasuk para wakil buruh yang melakukan negosiasi dengan pengusaha, yang didakwa telah melakukan penghasutan kepada para buruh untuk melakukan aksi mogok yang mengakibatkan kerusakan barang-barang di PT. Maspion. Meskipun ke-23 buruh menolak semua dakwaan Penuntut Umum dan Munir, S.H. serta 6 advokat lainnya dari LBH Surabaya telah melakukan pembelaan terhadap mereka di pengadilan, namun putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tetap menyatakan ke-23 orang buruh terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara. Salah seorang wakil buruh yang dihukum adalah Rudy Mulyanto. Dia dihukum 6 bulan penjara dengan dakwaan telah melakukan penghasutan kepada buruh-buruh Maspion dengan cara menurunkan bendera Maspion dan menaikkan baju seragamnya (Wawancara dengan Poengky Indarti melalui email 5 Juli 2005).



Hal yang sangat menarik adalah mogok besar seperti yang terjadi di Maspion ini muncul secara tiba-tiba dan spontan. Mogok buruh ini dilakukan tanpa menggunakan organisasi tertentu atau tanpa ditunggangi organisasi tertentu, dan diselesaikan tanpa menggunkan peran organisasi buruh. Menurut laporan pemeriksaan kepolisian, polisi tidak dapat menemukan bukti adanya perencanaan sebelum hari H dilakukannya unjuk rasa. Para wakil buruh Divisi Logam kebanyakan tidak saling mengenal sebelum terjadinya unjuk rasa, dan tidak ada latar belakang organisasi, baik di dalam maupun di luar pabrik (Suparman n.d.: 7).

Buruh-buruh yang menjadi peserta unjuk rasa ketika itu juga tidak tahu dari mana dimulainya unjuk rasa. Mereka hanya mengatakan bahwa unjuk rasa itu “spontan”, yang berarti “tidak diorganisir”. Mereka menolak semua tuduhan yang mengaitkan aksi unjuk rasa tersebut dengan organisasi, karena pada waktu itu pihak manajemen juga melarang arisan buruh dan tidak ada organisasi dari luar yang masuk ke perusahaan. Menurut buruh-buruh Maspion, unjuk rasa spontan adalah “gaya orang pribumi”. Jika ada orang berani maju, maka “orang yang lain ikut saja”, itulah gaya orang pribumi (Wawancara dengan Surono, 16 Maret 2001). Gaya orang pribumi ini punya kapasitas mempercepat unjuk rasa sebagian menjadi pemogokan kerja total, yang dapat berujung menjadi amuk massa. Akan tetapi gaya ini mempunyai kekurangan karena tidak akan dapat menghasilkan sebuah organisasi. Keberhasilan mogok pada waktu itu hanyalah PHK terhadap personalia yang dianggap terlalu “birokrasi” dan “terlalu arogan”.

Pihak manajemen beralasan bahwa “sambung rasa” yang diterapkan oleh pihak manajemen setelah mogok adalah cara yang bagus untuk memperkuat hubungan manajemen dengan buruh. Menurut manajemen, dengan adanya sambung rasa maka telah terbukti bahwa mogok tidak ada lagi hingga Mei 1998 (wawancara dengan Andy Chandra, 20 Juli 2000). Tetapi pihak buruh beranggapan sebaliknya. Meskipun personalia yang bermasalah betul telah mendapat peringatan dan di-PHK, tetapi kondisi kerja di Maspion masih belum diperbaiki. Di Maspion masih sering terjadi mutasi, terutama ditujukan pada buruh yang berani bersuara kritis. Buruh tersebut akan segera “dibungkam” dengan cara dipindahkan ke unit. Waktu untuk sholat juga tidak diberikan hingga pada tahun 1998. Sedangkan tuntutan agar buruh tidak harus antri jika ingin ke toilet juga masih diberlakukan oleh pengusaha. Dan yang pasti adalah pemilihan untuk penggantian pengurus SPSI dengan cara pilihan langsung oleh buruh tidak pernah terjadi pada waktu itu (Wawancara dengan Surono, 16 Maret 2001).

Hal-hal tersebut di atas adalah contoh gerakan unjuk rasa oleh buruh pabrik yang biasa terjadi pada akhir masa rezim Soeharto yang disebut sebagai ‘perlawanan tanpa organisasi’.



3. Mogok di tahun 1998: Perlawanan menuju organisasi

Setelah berdiam diri selama 5 tahun, Masipon kembali memanas pada bulan Juni 1998. Meskipun harga barang-barang meroket naik akibat krisis moneter, pihak manajemen Maspion tetap mengikuti kebijakan Soeharto yang melarang perusahaan menaikkan upah buruh. Setelah Soeharto lengser pada tanggal 21 Mei, buruh Maspion kembali bergerak dengan menggunakan semboyan “Berani maju dulu, hukum belakangan”(wawancara dengan Poengky Indarti, Juni 2000). Mereka menggelar aksi unjuk rasa pada tanggal 3 Juni.

Mogok pada bulan Juni 1998 juga diawali dengan unjuk rasa spontan seperti kejadian mogok di tahun 1993. Para pemimpin di barisan depan tidak mempunyai pengalaman atau jaringan gerakan buruh baik di dalam maupun di luar pabrik. Misalnya Sugianto - anak petani terong dari Banyuwangi berusia 28 pada waktu itu, yang bekerja di Maspion sejak tahun 1991 dan menikah dengan sesama buruh Maspion – menjadi pahlawan utama, tetapi dia belum kenal dengan pimpinan yang lain dan belum pernah ikut gerakan sosial apapun. Dia hanya “berteriak keras di depan manajemen,” karena dia sebenarnya “ingin mengundurkan diri atau cepat di-PHK” dari Maspion yang kondisi kerjanya terlalu buruk.

Tekanan saat ini sudah demikian hebat. Akhirnya kita berontak! Mogok! Terus mogok lagi! Mogok yang paling dasyat! (wawancara dengan Sugianto, Juli 2000)

Mogok tahun 1998 juga berlangsung secara meluas seperti unjuk rasa spontan di tahun 1993. Tetapi pada unjuk rasa kali ini, peserta unjuk rasa lebih cepat meluas dan konsentrasinya lebih kuat. Unjuk rasa 1998 ini juga menjadi unjuk rasa yang terkenal di Indonesia. Jika dibandingkan dengan mogok tahun 1993, waktu itu hanya 4 pabrik di Unit I yang ikut mogok secara gentian (*relay*) selama 17 hari, tetapi pada tahun 1998 seluruh pabrik dari Unit I hingga V serentak ikut mogok pada hari ke-3. Hasil mogok juga sangat berbeda. Mogok tahun 1998 tuntutan buruh dapat dipenuhi perusahaan, termasuk penggantian pengurus SPSI. Inilah yang disebut ‘perlawanan menuju organisasi’. Kronologi mogok yang sangat dinamis selama 7 hari adalah sebagai berikut:

3 Juni: Unjuk rasa di Divisi Alumindo pada pk. 12:00 yang berlangsung meluas. Unjuk rasa ini diikuti oleh 500 buruh. Semua buruh di divisi Alumindo serentak ikut mogok kerja. Alasan unjuk rasa adalah menolak kebijakan 5 hari kerja, menghentikan lembur dan menolak penundaan pembayaran premi hadir. Pada jam istirahat, mogok meluas ke Divisi Logam dan



Stromking. Buruh-buruh membawa *picket* bertuliskan “Pro Reformasi Total” berjalan keliling kompleks pabrik di Unit I. Pada pk. 4 sore, semua buruh yang bekerja di 8 pabrik Unit I turun dan bergabung dengan kawan-kawannya yang telah terlebih dulu berunjuk rasa (*Memorandum* 4 Juni 1998; Sugianto, Juli 2000).

Setelah semua buruh Unit I bersatu, sebagian buruh mencoba keluar pabrik menuju Unit II yang berjarak 5 km untuk mengajak kawan-kawannya di Unit II bergabung mogok. Terjadi aksi dorong dengan aparat yang menjaga pabrik, tetapi kekuatan buruh berhasil mengalahkan penjagaan aparat. Buruh-buruh berhasil keluar dan melakukan rally menuju Unit II. Pada pk. 6 sore, buruh-buruh Unit I kembali ke pabrik bersama buruh-buruh Unit II (Sugianto, Juli 2000; Surono Maret 2001).

Tuntutan buruh ada 25 point, antara lain:

- 1) Bayar “T3”(Tunjangan Tidak Tetap) termasuk uang makan, uang transpor dan premi hadir,
- 2) THR: Tunjangan Hari Raya,
- 3) Bedakan upah dan bonus sesuai dengan masa kerja,
- 4) Waktu Sholat diberikan,
- 5) Seragam karyawan ganti, dari rok menjadi celana panjang,
- 6) Hentikan mutasi PHK,
- 7) Pembaharuan KKB,
- 8) Pemilihan untuk penggantian pengurus PUK SPSI (LBH Surabaya 1998: 7).

4 Juni: Long march ke Unit II. Sekitar 10 ribu buruh Unit I melakukan long march ke Unit II sehingga jalan raya menjadi macet selama 4 jam. Sebagaimana aksi tanggal 3 Juni kemarin, tujuan buruh-buruh Unit I melakukan long march adalah untuk mendapatkan simpati massa terhadap nasib buruh dan sekaligus mendapatkan dukungan dari Unit II dan III yang sebetulnya juga mengalami nasib yang sama dengan Unit I. Menanggapi aksi long march ribuan buruh ini, Kapolda Jawa Timur berpesan agar buruh-buruh “tidak membuat keonaran”.

Sementara, menghadapi tuntutan buruh, Alim Markus mengusulkan penawaran adanya sedikit kenaikan upah, uang makan, uang lembur, tetapi buruh menolak karena tawaran Alim Markus dianggap terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan tuntutan buruh, sehingga buruh tetap melakukan mogok. Setelah melakukan long march menjemput buruh-buruh Unit II dan III, buruh-buruh Unit I kembali menuju Unit I untuk berunding dengan pihak pengusaha, tetapi akibat hadangan aparat keamanan yang melarang buruh-buruh masuk kembali ke halaman



pabrik, akhirnya terjadi aksi dorong-mendorong dengan pihak aparat dan mengakibatkan rusaknya pintu depan pabrik, kaca besar, dan 9 mobil (LBHS 1998; *Jawa Pos* 5 Juni 1998; *Memorandum* 5 Juni 1998; *Surabaya Post* 6 Juni 1998).

5 Juni: Kematian Lasimo dan long march menuju DPRD Jatim. 15 ribu buruh berkumpul di Unit I dan mengadakan orasi bebas. Dalam kesempatan itu mereka berhasil memaksa Alim Markus untuk naik ke panggung dan melakukan orasi di hadapan belasan ribu buruh. Alim Markus terpaksa berbicara selama 15 menit dan berjanji akan menaikkan gaji sebesar 20 % (*Surabaya Post* 6 Juni 1998). Terhadap janji Alim Markus tersebut, buruh-buruh tetap menolak. Sugianto sebagai pimpinan aksi meminta buruh Maspion melakukan long march menuju gedung DPR Propinsi Jawa Timur untuk meminta dukungan anggota dewan karena Alim Markus hanya mau menaikkan sedikit dari tuntutan buruh (Sugianto Juli 2000).

Ketika buruh-buruh keluar dari pabrik terjadi konflik dengan pihak aparat yang melakukan barikade di pintu depan Maspion Unit I. Seorang buruh laki-laki bernama Lasimo, 29 tahun, berdarah Madura kelahiran Pasuruan, dan mempunyai satu anak – mengalami luka berat di bagian dalam tubuhnya karena dipukul oleh aparat Batalyon Arhanudse 8 Gedangan – Sidoarjo dengan menggunakan popor senapan laras panjang. Tiga hari kemudian Lasimo meninggal dunia. Hasil *visum et repertum* menunjukkan bahwa Lasimo meninggal akibat tulang rusuknya patah dan menusuk livernya hingga pecah. Patahnya tulang rusuk Lasimo diduga akibat terkena pukulan benda tumpul (popor senapan).

Buruh-buruh Maspion akhirnya sukses keluar dari pintu depan dan bersiap melakukan long march menuju Surabaya. Tetapi mereka harus menghadapi lagi barikade polisi dan marinir di depan kantor Polda Jatim. Meskipun buruh-buruh tersebut akhirnya gagal melakukan long march hingga DPRD Jatim, tetapi sebagian buruh yang menggunakan kendaraan memilih alternatif melewati jalan tol dan lolos dari hadangan aparat keamanan. Para buruh yang memilih jalur alternatif tersebut akhirnya sukses sampai ke DPRD Jatim dan mengadakan dialog dengan Ketua Komisi E, Asmono, dan mengadakan tuntutan buruh (LBHS 1998; *Surya* 6 Juni 1998).

6 – 8 Juni: Dari Unit I sampai Unit V. Buruh Unit II dan III melakukan long march ke Unit I, sedangkan 10 ribu buruh Unit IV dan V mulai mogok kerja. Sebagian buruh terus melakukan negosiasi dengan wakil rakyat di DPRD (*Surabaya Post* 6 Juni 1998). Pihak pengusaha mulai melakukan mutasi dan PHK pada semua buruh yang tidak kembali kerja



selama 6 hari berturut-turut, tetapi buruh tidak mengacuhkan tindakan balasan pengusaha dan memilih untuk terus mogok hingga tuntutan mereka berhasil. Dua puluh ribu buruh melakukan long march lagi menuju DPRD Jatim, tetapi lagi-lagi dihadang oleh barikade aparat di depan Markas Polda Jatim. Terjadi aksi saling lempar batu yang mengakibatkan 15 polisi dan 14 buruh luka-luka, merusakkan mobil-mobil yang diparkir di sekitar Mapolda. Alim Markus menolak datang ke DPRD, tetapi berjanji akan memberikan uang makan seribu rupiah per-hari (LBHS 1998; *Surya* 9-10 Juni 1998; *Surabaya Post* 10 Juni 1998).

9 Juni: Kesepakatan di DPRD Jatim. Dua puluh ribu buruh datang ke DPRD dengan mengendarai sekitar tiga ratusan sepeda motor dan menumpang 50 truk. Buruh-buruh menikmati demo sambil mendengar lagu dangdut dan berjoget bersama. Alim Markus yang telah dipanggil Ketua DPRD, terpaksa datang menuju kantor DPRD dengan menggunakan kendaraan panser polisi dan kawalan ketat aparat dari kantor Maspion masuk menuju gedung DPRD melalui pintu belakang. Helikopter polisi sudah siap siaga untuk mengantisipasi kondisi yang tidak terduga.

Alim Markus kemudian berdialog dengan 15 wakil buruh yang disaksikan oleh Ketua DPRD Jatim, Kapolwiltabes Surabaya, seluruh anggota Komisi E DPRD Jatim, Kepala Kanwil Depnaker, Polisi, dan wartawan. Alim Markus meminta maaf dahulu kepada pihak DPRD dan polisi karena tidak mampu menyelesaikan kasus buruh di dalam pabrik, sehingga akibatnya mengganggu semua pihak. Sugianto mengatakan, “Pak, kenapa Bapak tidak mau memberi uang makan saja kepada buruh-buruh Maspion meskipun Bapak menjadi sukses dan kaya luar biasa karena buruh-buruh Maspion”. Alim Markus memanggil Sugianto “adik”, bertanya apakah Sugianto buruh Maspion atau tidak. Sugianto kemudian memberikan Kartu Karyawan Maspion.

Dalam perundingan tersebut, Alim Markus berjanji akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menaikan gaji;
- 2) Membantu penyelenggaraan pemilihan untuk penggantian pengurus;
- 3) Uang makan Rp. 1.000,- perhari;
- 4) Uang transpor Rp. 500,- perhari;
- 5) Uang premi hadir Rp. 500,- .

Dengan demikian semua buruh akan diberikan Rp. 50.000,- (Rp. 2.000,- dikali 25 hari, atau sekitar US\$ 4) per-bulan diluar gaji pokok, atau dengan kata lain Maspion harus mengeluarkan uang sebesar 1,25 milyar rupiah (US\$ 125.000.) per-bulan. Setiap buruh yang



lembur akan diberi uang roti Rp 350 per-hari. Alim Markus sambil menangis meminta pada wakil buruh agar menjaga perusahaan (*Surya* 10 Juni 1998).

Ada advis dari dewan sehingga saya berani memberi Rp. 1.000 di luar UMR. Saya bondo nekat, ya nati utang dulu tidak apa-apa, asal pabrik dapat berjalan lancar ... Kalu pekerja masih menyayangi Maspion sebagai lading pekerjaan, tolonglah di jaga yang baik. Adik-adik harap maklum, sebab advis dokter Amerika, katanya saya jangan terlalu diforsir nanti bisa lebih fatal lagi. Kalau Anda masih mencintai pimpinannya tolong dipatui itu (*Surya* 10 Juni 1998). ... Kalau anda masih menuntut lebih dari itu, saya angkat tangan (*Jawa Pos* 10 Juni 1998).

Sugianto sepakat dan berjanji akan kembali kerja.

Kami sangat berterima kasih sekali ada tambahan tersebut. Saya kira hasil ini merupakan hasil maksimal. Kami akan melaksanakan kesepakatan ini dan besok akan mulai kerja kembali (*Surya* 10 Juni 1998).

Setelah perundingan, Alim Markus kembali keluar dari gedung DPRD dengan menggunakan panser. Sugianto membacakan isi kesepakatan antara Alim Markus dan perwakilan buruh di hadapan massa buruh yang disambut teriakan gembira buruh-buruh Maspion (*Jawa Pos* 10 Juni 1998; *Surya* 10 Juni 1998).

Pada keesokan harinya diselenggarakanlah pergantian kepengurusan SPSI yang berlangsung selama dua hari, yaitu hari pertama untuk pemilihan ketua PUK dan hari kedua untuk pemilihan ketua divisi. Akhirnya terpilih Sugianto sebagai Ketua PUK SPSI PT. Maspion I, Maryono sebagai Ketua PUK SPSI PT. Alumindo, dan Edi Supriantono sebagai Ketua PUK SPSI PT. Indal. Semua ketua PUK SPSI dan ketua divisi adalah para pahlawan dalam aksi mogok buruh Juni 1998.

PUK SPSI mempunyai cukup banyak pengurus dalam strukturnya. PUK SPSI PT. Maspion I mempunyai 31 pengurus inti yang terdiri dari 1 Ketua PUK, 3 Wakil Ketua, 9 Ketua Divisi (Sub Unit) dan 18 Wakil Ketua Divisi. Jika ditambah dengan para pengurus dari PT. Indal dan PT. Alumindo maka jumlah pengurus inti PUK SPSI di PT. Maspion Unit I menjadi hampir 50 orang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa munculnya kepemimpinan buruh di Maspion stabil dan cukup banyak potensi di dalam pabrik. Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa PUK SPSI Maspion yang baru adalah wakil buruh pertama yang benar-benar muncul dari bawah setelah 14 tahun berdiri.



Tabel 1. Stuktur Inti PUK SPSI PT. Maspion I Periode Tahun 1998-2001

Ketua (Sugianto)				
Bendahara (Ginah Purwati)	Wakil Ketua Yuni Priyo J. Iswan Heri I. Mustakim			Sekretaris (Ely Marini)
Wakil Bendahara (Endang Setyowati)				Wakil Sekretaris (Nur Hidayat W.)
Bidang Pendidikan	Bidang Advokasi	Bidang Sosial	Bidang Olah Raga	Bidang Umum
Humas (Suhartatik ; Mustofa)				
<u>9 Ketua Divisi/Sub Unit</u>				
1. Stomking (Haryono), 2. Enamel (Surono), 3. Teflon (Heri Suprianto), 4. Elektro (Sugeng Widodo), 5. Logam (Jamal), 6. Plastik (M. Yasin), 7. D.P.U. (Riduwan), 8. B. Induk (Sutoko), 9. SP. Transportasi (Hasan Ali)				
2 Wakil Ketua setiap Divisi (18 pengurus)				
13 Humas setiap divisi (57 pengurus)				

Sumber: PUK FSPSI PT. Maspion I 2001b; Wawancara dengan pengurus PUK April 2001.

* Kepala Bidang dari sebagian Ketua Divisi

III. Munculnya Kekuatan Kepemimpinan Buruh di Maspion

1. Konsolidasi Organisasi Buruh dan Kepemimpinannya

Tantangan besar bagi serikat pekerja (buruh) baru biasanya adalah respon yang kurang menyenangkan dari pihak pengusaha. Tetapi pengurus SPSI merasa hal tersebut bukan problem bagi mereka. Mereka malah dapat berkomunikasi dengan baik dan merasa bangga terhadap perubahan gaya manajemen, yang dulunya “sewenang-wenang” berubah menjadi “musyawarah /dialog”. Sugianto, ketua PUK SPSI PT. Maspion Unit I, mengatakan bahwa pihak manajer “tidak berani” lagi terhadap pihak karyawan, dan “budaya tekan-menekan” atau “budaya takut” sudah hilang, sehingga suasana “sudah menjadi santai” (wawancara dengan Sugianto, Juli 2000).

Perasaan saya dalam hal berdialog dengan pihak manajemen Maspion pada tahun 2001, mereka lebih tertarik untuk berdialog dengan para pengurus. Andy Tjandra, Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia di PT. Maspion I menjelaskan sebagai berikut:

Kami tidak mau mendahului pihak manajemen Maspion. ... dengan terbentuknya SPSI yang baru, yang benar-benar dari bawah. Pada waktu peralihan, peralihanya cukup damai, tidak ada perebutan kekuasaan. ... Dan kami yang penting untuk membina agar tidak terjadi unjuk rasa. Kami mempunyai



acara “Sambung Rasa” untuk membicarakan permasalahan yang mungkin muncul antara pengusaha dan pekerja. Sambung rasa itu tetap dijalankan sampai sekarang. Di dalam Sambung Rasa, untuk informasi yang sekecil apapun, kami tanggap dengan bijaksana. ... Kalau mogoknya damai itu tidak apa-apa, tapi di sini suasananya berbeda dengan di Korea. Di sini 32 tahun ditekan terus, begitu ada kebebasan, jadi macam-macam yang timbul. Kami tidak menghendaki hal itu. Sekalipun para pemimpin dari SPSI bisa mengerti tapi kan orang banyak, resikonya terlalu tinggi. Kami berharap tidak perlulah sampai mogok. Kita bicarakan saja dalam satu meja dengan akal sehat dan dengan pikiran yang dingin. Itu lebih enak. Dan kita proses. Nah, akhirnya bisa ada kesepakatan-kesepakatan yang cukup manis yang bisa dinikmati oleh semua anggota SP (Wawancara dengan Andy Tjandra, 20 Juli 2000).

Rommy Ceha, Wakil Direktur PT. Alumindo, juga memberikan tanggapan yang sama, sebagai berikut:

Yang paling penting itu komunikasi. Komunikasi itu kita usahakan antara manajemen dengan pekerja yang diwakili oleh pengurus-pengurus SPSI. Setiap saat harus ada kontak, selalu ada interaksi. ... Masalah itu banyak. Tetapi dengan komunikasi masalah itu menjadi kecil dan sedikit. ... kalau pekerja menyampaikan segala aspirasi yang disampaikan melalui SPSI, kita respon! ... Jadi harapan manajemen, kalau minta, jangan mogok, pakai omong, pakai bicara! Setelah kita bicara pasti ada kesepakatan, pasti bisa selesai. Itu paling penting (Wawancara dengan Rommy Ceha, 20 Juli 2000).

Perjuangan para pemimpin buruh telah menghasilkan perubahan yang cukup besar pada pihak manajemen. Semua hak normatif buruh - termasuk cuti haid dan cuti hamil - diberikan sesuai ketentuan undang-undang. Buruh juga diberikan waktu untuk melaksanakan Sholat. Bahkan pihak manajemen juga membangun sebuah Masjid di dalam kompleks perusahaan yang dapat menampung 3.000 buruh. Pembaharuan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) menjadi senjata bagi buruh untuk memperbaiki kondisi kerja agar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada tahun 2001, buruh yang telah bekerja lebih dari 6 tahun mendapatkan upah lebih dari satu juta rupiah (US\$ 100) per-bulan jika ditambah dengan upah lembur.

Waktu itu adalah masa multi-serikat buruh karena Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, sehingga tantangan terhadap kepemimpinan buruh tidak hanya muncul dari pihak manajemen, tetapi juga dari pihak buruh sendiri. Serikat buruh yang lain, seperti misalnya SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), SARBUMUSI (Serikat Buruh Muslim Indonesia) mulai membentuk basisnya di Maspion pada tahun 2000, tetapi pengurus inti SPSI



Maspion Unit I tetap sukses mempertahankan keanggotaan mayoritas di kalangan buruh Maspion.

Selanjutnya Sugianto terpilih kembali sebagai Ketua PUK PT Maspion I untuk kedua kalinya dengan masa kerja tiga tahun. Sugianto memperoleh 4.723 suara dari total jumlah suara 7.413 di MUSNIK (Musyawarah Unit Kerja) yang diselenggarakan pada tanggal 13-23 Juli 2001 (PT. Maspion 2001: 20).

Bagaimana pemimpin buruh dapat mengkonsolidasikan posisi mereka? Saya mencoba analisa strategi untuk mengkonsolidasi kepemimpinan buruh di Maspion I selanjutnya.

2. Strategi untuk Konsolidasi Kepemimpinan

(1) Cara Militan: Mobilisasi Massa dan Mogok Terus

Cara utama Pemimpin SPSI Maspion Unit I untuk dapat mengkonsolidasi buruh-buruh adalah keberanian mereka membawa massa buruh untuk menghadapi resiko apapun, setidaknya sampai tahun 2001. Mobilisasi massa dan mogok terus!

Selama 8 bulan setelah pergantian pengurus baru, SPSI Maspion Unit I melakukan mogok sebanyak dua kali lagi pada November 1998 dan Februari 1999. Mogok pada bulan November 1998 dilakukan selama 2 hari secara militan dengan tuntutan utama adalah Tunjangan Hari Raya (THR). Pada saat buruh-buruh mogok, perwakilan buruh mengadakan perundingan dengan pengusaha, yang diperantarai oleh Kanwil Depnaker dan menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak (*Jawa Pos* 26, 27, 28 November 1998; *Surabaya Post* 28 November 1998; *Republika* 28 November 1998).

Sedangkan mogok yang terjadi pada bulan Februari 1999 dilakukan selama 9 hari dengan tuntutan menaikkan Tunjangan Tidak Tetap (T3). Buruh melakukan aksi mogok setelah gagal mencapai kesepakatan meskipun telah berunding dengan pihak pengusaha selama satu bulan. Aksi mogok buruh kali ini oleh media massa disebut sebagai “kerusuhan” karena dalam melakukan aksinya, buruh juga merusak kaca pabrik dan mobil, serta melempari aparat kepolisian dengan batu. Dalam aksi buruh kali ini, kelompok mahasiswa ASPR (Arek Suroboyo Pro-Reformasi) juga ikut masuk membantu demo buruh.



Pada tanggal 28 November 2000, 60.000 buruh Sidoarjo termasuk buruh Grup Maspion melakukan demo untuk menaikkan UMR (Upah Minimum Regional) Sidoarjo agar disamakan dengan UMR Surabaya. Terjadi perbedaan opini antara buruh dan media massa dalam menyikapi aksi ini. Bagi buruh, aksi ini disebut sebagai “Aksi Buruh Sidoarjo”, sedangkan media massa menyebutnya sebagai “Kerusuhan Buruh Sidoarjo” (*Jakarta Post* 29 November 2000; *Detikworld* 28 November 2000; *Tempo* 11 Desember 2000). Aksi buruh Sidoarjo ini adalah aksi buruh terbesar di Indonesia. Untuk dapat melakukan aksi sehingga berhasil menekan Pemerintah Daerah menerima tuntutan mereka, maka SPSI Maspion Unit I melakukan peran aktif mereka dan berinisiatif mengajak serikat buruh pabrik-pabrik lain di Sidoarjo, seperti SP Fortune, SP Cahaya Cemerlang, dan lain-lain untuk bergabung bersama mereka melakukan demo. (Wawancara dengan Sugianto, 23 Desember 2000)

Mogok secara militan yang dilakukan buruh Maspion telah menarik perhatian semua pihak di daerah. Sehingga hal ini juga menjadi tekanan secara tidak langsung kepada pihak pengusaha. Misalnya, pada saat mogok buruh Februari 1999, beberapa pengusaha lain di Jawa Timur ketika bertemu dengan Gubernur mengeluhkan kekhawatiran mereka terhadap turunnya investasi asing di Jawa Timur jika buruh Maspion terus melakukan mogok. Oleh karena itu untuk membantu menyelesaikan mogok Maspion, DPC FSPSI, Kapolda, Kanwil Depnaker, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ikut membantu proses perundingan (*Surya* 10, 11, 18 Februari 1999; *Jawa Pos* 15, 19, 24 Februari 1999).

(2) *Penyatuan Aliran (Syncretism): Antara Federasi dan LSM*

Kepemimpinan buruh Maspion I merupakan contoh aliran gerakan buruh secara *syncretism* (penyatuan) antara federasi serikat pekerja dari tingkat atas dan LSM perburuhan dari tingkat bawah. Mereka menggunakan sistem lama (SPSI) dan meneruskan hubungan baik dengan para aktivis LBH Surabaya meskipun aliran keduanya berbeda.

Para pemimpin mogok buruh Juni 1998 hanya mengganti para pengurus SPSI lama saja, kemudian masih tetap menggunakan nama SPSI, meskipun banyak orang mencurigai federasi itu (FSPSI) apakah benar-benar mandiri atau tidak. Alasan utama mereka adalah hak-hak buruh yang belum dipenuhi pengusaha saat itu jauh lebih mendesak untuk diperjuangkan, dibandingkan dengan kebutuhan mengganti nama serikat. Mereka langsung dihadapkan pada permasalahan-permasalahan buruh, sehingga tidak mempunyai waktu untuk memikirkan serikat buruh baru. Selain itu, mereka juga berharap bahwa FSPSI akan bisa melindungi mereka karena FSPSI secara organisasi sudah besar dan stabil.



Tetapi mereka juga memerlukan advokasi dan jaringan solidaritas luar negeri dari LSM, seperti misalnya dari LBH Surabaya, karena kualitas bantuan dari FSPSI saat itu sangat rendah. Sugianto pernah mengatakan bahwa “SPSI Maspion cinta pada LBH, dan LBH cinta pada SPSI Maspion”. Seperti perkataan Sugianto, aktivis LBH Surabaya juga tetap membantu pengurus SPSI Maspion meskipun secara umum mereka kurang suka dengan Federasi SPSI.

Selama beberapa tahun, setidaknya hingga Mei 2001, *syncretism* tersebut tetap diteruskan. Ratusan Pengurus SPSI Maspion juga ikut berpartisipasi dalam Aksi Buruh 1 Mei memperingati Hari Buruh Internasional yang diorganisir Ornop (Organisasi Non Pemerintah) Jawa Timur pada tahun 2000 dan 2001, meskipun Federasi SPSI di tingkat nasional maupun tingkat daerah menolak ikut berpartisipasi. Mereka juga mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Ornop, antara lain seminar tentang pengupahan yang diorganisir Kelompok Kerja Humanika dan beberapa LSM lainnya. SPSI Maspion juga mencoba bekerjasama dengan LBH Surabaya mengambil jalur hukum dalam memperjuangkan kenaikan upah buruh dan mereka berhasil. Mereka membawa kasus upah ini ke P4D dengan bantuan LBH Surabaya dan sukses menaikkan upah sesuai tuntutan pihak buruh tanpa melakukan mogok pada tahun 2001.

Sambil meneruskan hubungan baik dengan LBH, kepemimpinan buruh Maspion dapat meningkatkan posisi mereka untuk bisa sukses masuk ke DPC. Sugianto, misalnya, menjadi Wakil Ketua DPC Sidoarjo Sektor LEM (Logam, Elektronik, dan Mesin) FSPSI, sedangkan Maryono menjadi pengurus Forkom (Forum Komunikasi) di DPC tersebut.

(3) Check-off System dan Keuangan Minimalis

SPSI Maspion menggunakan *check-off system* dalam hal penerimaan iuran anggota. Dengan menggunakan system ini maka iuran anggota yang berjumlah total lebih dari Rp 10 juta per-tahun dapat diterima dengan lancar (PUK FSPSI Maspion I 2001).

Tabel 2. Keuangan SPSI PT. Maspion Unit I, Periode Tahun 1998-2000 (Rupiah)

Tahun	Masuk	Keluar	Sisa
1998	18.472.850	16.306.650	2.166.200
1999	13.691.000	12.091.400	3.765.800
2000	14.208.300	13.560.650	4.413.450



Sumber: PUK FSPSI PT. Maspion I, *Pertanggungjawaban Pengurus: Periode 1998-2001*.

* Catatan: Pada tahun 1998 jumlah uang yang masuk besar karena ditambah dengan saldo rekening SPSI kepengurusan terdahulu.

Hal yang menarik dalam mengelola keuangan adalah SPSI tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART SPSI. Berdasarkan AD/ART, iuran yang harus dibayar anggota adalah sebesar 1% dari gaji pokok, sehingga iuran anggota per-bulan seharusnya Rp. 2.350,- pada tahun 2000. Tetapi ternyata anggota hanya diwajibkan membayar iuran sebesar Rp. 150,- per-bulan, dan pada bulan Maret 2001 baru ditingkatkan menjadi Rp. 500. Peningkatan itupun tidak dihitung secara prosentase dari gaji pokok.

Iuran anggota itu terlalu sedikit jika dibandingkan dengan iuran anggota SP perusahaan yang lain, misalnya SP TSK PT. Victory (pabrik sepatu Reebok) di Surabaya yang memberlakukan iuran anggota sebesar Rp. 1.800,- per-bulan pada tahun 2001 atau sebesar 0.5% dari gaji pokok. Oleh karena itu penghasilan SPSI Maspion sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah anggotanya, sehingga kebijakan pembayaran iuran yang sangat kecil ini benar-benar tidak rasional. Dengan demikian maka SPSI Maspion tidak akan bisa menjadi serikat buruh kaya yang bisa mendanai segala keperluannya dengan uang dukungan dari anggotanya.

Tetapi kebijakan iuran minimalis ini mempunyai dua alasan yang cukup rasional. Alasan pertama, SPSI Maspion tidak perlu sering mengambil dana dari iuran anggota yang terkumpul untuk membayar setoran pada DPC, DPD, dan DPP FSPSI dengan alasan mereka tidak mempunyai banyak sisa iuran anggota. Berdasarkan AD/ART FSPSI, iuran yang terkumpul seharusnya dipotong 50 % dan harus disetorkan masing-masing kepada DPC (30%), DPD (10%), dan DPP (10%) FSPSI. Pada prakteknya, selama 2 tahun sebelum 2001, SPSI Maspion selalu menolak untuk membayar pada DPC, DPD dan DPP. Pada tahun 2001 mereka kadang-kadang mulai membayar, tetapi jumlahnya sedikit, sebagaimana terlihat dalam <Tabel 3>, mereka sama sekali belum pernah membayar sebesar 50% dari iuran mereka. Hal tersebut menggambarkan bahwa SPSI Maspion independen dari FSPSI dan hubungan dengan FSPSI hanya bersifat kemitraan saja.

Alasan kedua, iuran minimalis sangat berguna untuk bersaing dengan SB/SB lain. Misalnya, ketika SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dibentuk di Unit II pada tahun 2000, hampir 1.000 anggota keluar dari SPSI dan pindah ke SBSI. Tetapi dari 1.000 anggota yang keluar tersebut, hanya 200 orang yang tetap bertahan di SBSI, sedangkan 800 anggota lainnya kembali masuk menjadi anggota SPSI lagi. Sedangkan di Unit I, SBSI hanya mempunyai 24



anggota saja. Menurut keterangan Sugianto, salah satu alasan mengapa buruh tetap memilih SPSI adalah karena soal iuran (wawancara dengan Sugianto pada tahun 2001). SBSI menerapkan iuran anggota berdasarkan AD/ART yang dibuat oleh Pengurus Pusat SBSI yaitu sebesar Rp 1.000,- per-bulan. FNPBI yang baru membentuk basisnya di Unit I juga menerapkan iuran sebesar Rp 1.000,-. *Check-off system* yang diterapkan di Maspion juga cukup menyulitkan SBSI dan FNPBI dalam menerima iuran anggota, karena perusahaan secara otomatis akan memotong upah buruh untuk iuran SPSI, sehingga buruh-buruh yang menjadi anggota SBSI dan FNPBI harus meminta kembali potongan upah mereka yang sudah langsung disetor kepada SPSI, untuk bisa dibayarkan ke SBSI atau FNPBI (wawancara dengan ketua basis SBSI dan FNPBI, April 2001).

Cerita sukses kepemimpinan buruh Maspion sudah mendekati akhir, karena bagian berikut akan menggambarkan banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh kepemimpinan baru ini.

3. Tantangan Lain bagi Kepemimpinan Buruh

a. Meningkatkan Kualitas Manajemen Serikat Buruh:m Dari memobilisir ke mengorganisir

Para pengurus SPSI Maspion memperoleh kritikan bahwa mereka bukan mengorganisir buruh, tetapi hanya memobilisir buruh saja (Wawancara dengan Anam, 12 Januari 2003). Kritik seperti ini menunjukkan kesimpulannya tantangan baru bagi kepemimpinan buruh. SPSI Maspion menggunakan cara militan ketika berunding secara khusus, tetapi kurang jelas kegiatan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Oleh karena itu untuk dapat menjawabnya maka kita perlu menganalisa keuangan SPSI.

Tabel 3 adalah analisa saya dari dokumen Transaksi Pengeluaran Dana SPSI Triwulanan. Pemasukan iuran SPSI tidak begitu besar karena mereka menggunakan strategi keuangan minimalis. Apalagi sebanyak 40 hingga 60 % dari pengeluaran keuangan mereka ternyata kembali secara langsung pada anggota, misalnya dengan cara sumbangan kematian. Saya berpendapat bahwa untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan SPSI kepada anggotanya, maka SPSI seharusnya banyak menganggarkan dananya pada kebijakan dan kegiatan. Akan tetapi jika melihat Tabel 3 tersebut, maka dana yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan, olahraga, pembelaan dan keperluan kantor masih sedikit, meskipun jumlah dana yang keluar untuk kegiatan pembelaan agak meningkat pada tahun 2001 jika dibandingkan dengan tahun 2000.



Pada bulan Januari 2003 saya kembali mengunjungi kantor SPSI. Pada waktu itu Sugianto terlihat sangat sibuk karena dia telah diangkat menjadi wakil ketua DPC LEM SPSI Sidoarjo, oleh karena itu Surono sebagai wakil ketua bertugas untuk menjalankan manajemen SPSI PT. Maspion I. Surono merasa bahwa kebutuhan meningkatkan kualitas pelayanan dan kegiatan SPSI sangat mendesak. Dia merujuk pada slogan “Dari Anggota, Untuk Anggota, Oleh Anggota”, dan mendesak akan mengeluarkan uang untuk pendidikan anggota sampai 30% dari total pengeluaran dan akan membeli komputer guna keperluan kantor SPSI. Oleh karena itu dia akan menaikkan besarnya iuran anggota dan akan meminta audit keuangan SPSI (Wawancara dengan Surono, 17 Januari 2003).

Saya tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menganalisa keuangan SPSI Maspion dengan cara membaca dokumen Transaksi Pengeluaran Dana SPSI setelah tahun 2003, sehingga saya tidak tahu apakah gagasan Surono untuk memajukan organisasi berhasil atau tidak. Tetapi yang saya ketahui, iuran anggota tidak dinaikkan. Karena pada kunjungan saya di bulan Juli tahun 2004, iuran anggota SPSI masih tetap sebesar Rp 500,- saja (PUK SPSI PT.Maspion I, 2004). Kemudian, pada kunjungan saya bulan Februari 2005 ke kantor SPSI, saya melihat bahwa mereka belum mempunyai komputer sendiri.

Tabel 3. Analisa Keuangan SPSI PT. Maspion I, Triwulanan 2000 dan 2001 (Rupiah)

periode		Th. 2000 (bulan 4, 5, 6)	Th. 2001 (bulan 1, 2, 3)	Keterangan
Masuk*		3.639.450	5.369.100	
Keluar		2.933.000	4.221.600	
Sisa		706.450	1.147.500	
Rincian dana Keluar**	DPC	0 (0 %)***	310.000 (7.34 %)	Rp 200 ribu donasi untuk Partai Kongres Pekerja
	Kantor	351.000 (11.97 %)	212.500 (5.03 %)	Administrasi, Koran, tamu
	Transport	107.500 (3.67 %)	197.000 (4.67 %)	Uang transport untuk perjalanan jarak jauh
	Pembelaan	202.500 (6.90 %)	445.000 (10.54 %)	P4D dan Pengadilan
	Sumbangan	1.170.000 (39.89 %)	2.477.100 (58.68 %)	Jika keluarga meninggal Rp 15.000,- per-kasus



	Pendidikan	37.000 (1.26 %)	0 (0 %)	Biaya bidang pendidikan
	Olahraga	410.000 (13.98 %)	115.000 (2.72 %)	Partisipasi POM, bola voli
	Solidaritas	55.000 (1.88 %)	130.000 (3.08 %)	Acara LSM perburuhan
	Masyarakat	0 (0 %)	335.000 (7.94 %)	Donasi untuk orang Madura setelah kerusuhan Sampit

Sumber: PUK FSPSI PT. Maspion I, 2000a. "Transaksi Pengeluaran Dana SPSI Bulan April-Juni 2000" dan 2001a. "Transaksi Dana SPSI Bulan Januari-Maret 2001".

Keterangan:

* Pemasukan disini tanpa saldo dari bulan sebelumnya.

** Rincian dana keluar disini adalah tambahan dari saya

*** % adalah prosentase dari total pengeluaran.

b. Solidaritas Antar Gerakan Buruh Daerah

Salah satu strategi yang meningkatkan kekuatan SPSI PT Maspion I adalah penyatuan aliran atau *syncretism* antara Federasi FSPSI dan LSM daerah, sebagaimana yang sudah saya kemukakan pada bagian terdahulu. Tetapi dalam kondisi saat ini, strategi tersebut ternyata sudah tidak terlihat lagi. Kepemimpinan SPSI yang saya lihat ternyata lebih mengarah pada federasi dan kehilangan penyatuan aliran. Ada dua faktor besar dari LSM dan Federasi untuk perubahan tersebut sebagai berikut:

1) Perubahan di LBH Surabaya: LSM yang menjadi mitra utama bagi SPSI Maspion adalah LBH Surabaya. Tetapi ternyata telah terjadi perubahan, baik dari individu maupun organisasi LBH Surabaya.

Poengky Indarti, yang sangat membela SPSI Maspion keluar dari LBH Surabaya dan ditugaskan menjadi kepala divisi perburuhan YLBHI di Jakarta pada bulan April 2001. Sebagai kepala divisi perburuhan YLBHI, Poengky harus memfokuskan konsentrasinya pada kebijakan perburuhan nasional. Selanjutnya pada tahun 2002 dan 2003 Poengky bekerja di Kontras dan Imparsial yang lebih memfokuskan pada isu HAM dan anti-kekerasan.



Sepeninggal Poengky, para pengurus SPSI PT. Maspion masih tetap menginginkan pendekatan dan hubungan solidaritas yang dilakukan pada masa Poengky di LBH Surabaya, antara lain gaya kegiatan Poengky yang suka mengunjungi buruh, baik di kantor SPSI maupun di rumah-rumah pengurus untuk berdiskusi tentang kegiatan, hukum, sospol, dll sebagai kawan. Pada saat SPSI Maspion sangat membutuhkan bantuan LBH Surabaya untuk penguatan manajemen serikat buruhnya, LBH Surabaya ternyata tidak mempunyai kaderisasi yang baik. Divisi Perburuhannya harus menangani banyak kasus dengan hanya mengandalkan tenaga Sudarto dan seorang relawan yang selalu berganti-ganti (Observasi langsung pada Januari 2003 dan wawancara dengan Poengky, Juli 2005). Oleh karena itu perhatian kepada SPSI Maspion menjadi berkurang. Kondisi tersebut semakin parah setelah keluarnya Sudarto - yang juga membela SPSI PT. Maspion dan sangat cakap berperan sebagai konsultan hukum perburuhan - dari LBH Surabaya pada akhir tahun 2004 dan menjadi pengacara profesional di Surabaya.

LBH Surabaya sendiri juga berubah karena terjadinya konflik internal di tubuh YLBHI, yaitu konflik antara kelompok “Dewan Pendiri” yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution dkk melawan kelompok “Dewan Pengurus” yang dimotori Bambang Widjojanto, Munir, dkk. “Pertempuran” tersebut dimenangkan oleh Buyung karena dukungan beberapa kantor dan pengurus LBH. Dengan kembali berkuasanya Buyung atas YLBHI menyebabkan para donor internasional yang selama ini mendanai YLBHI dan kantor-kantor LBH menarik diri karena *image* Buyung yang tidak dapat dilepaskan dari kedekatannya dengan kalangan militer, antara lain Jendral Wiranto yang dituduh bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM berat antara lain di Timtim dll. Akibat ditinggalkan konsorsium donornya, YLBHI dan 14 kantor LBH termasuk LBH Surabaya harus mencari proyek sendiri untuk dapat mengoperasikan organisasinya. Pada waktu itu, LBH Surabaya berhasil mendapatkan beberapa proyek antara lain yang menyangkut isu politik atau *good governance* (Poengky, Juli 2005).

Pendidikan untuk para pengurus Maspion pada bulan Oktober 2001 adalah pendidikan terakhir yang dilakukan LBH Surabaya. “Aktivitas perburuhan yang dinamis” yang selama ini menjadi kehormatan bagi Divisi Perburuhan LBH Surabaya sejak zamannya Munir telah berakhir.

LSM perburuhan selain LBH Surabaya di Jawa Timur, seperti misalnya Kelompok Kerja Humanika dan Yayasan AREK tidak mengontak pengurus SPSI PT. Maspion I secara terus-menerus. Mereka berasumsi bahwa tugas dan kewajiban untuk mengontak SPSI Maspion tetap berada di tangan LBH Surabaya karena kebiasaan yang dilakukan LBH



Surabaya selama ini. Oleh karena itu LSM perburuhan lainnya menjadi tidak peduli pada SPSI PT. Maspion I.

2) Kekuatan tarik Federasi: Sistem DPC dan DPD mempunyai sumber daya untuk menarik pengurus PUK SPSI karena pengurus PUK bisa menduduki posisi di DPC dan DPD.

Sugianto dan Maryono mendapat posisi di DPC adalah hal yang baik bagi regenerasi kepengurusan di DPC dan DPD FSPSI. Mereka pahlawan buruh dari bawah, sehingga diharapkan akan bisa mengubah FSPSI menjadi lebih murni dan demokratis. Akan tetapi mereka juga bertemu dan mulai bekerjasama dengan organisasi mitra FSPSI, misalnya Baladhika Karya. Organisasi itu adalah binaan militer dan Golkar di zaman Soeharto, yang masuk ke komunitas buruh melalui kegiatan pembelaan terhadap buruh. Pengurus SPSI membutuhkan pelayanan konsultasi dari Baladhika Karya karena LBH Surabaya sudah tidak seperti dahulu.

Saya menduga hal tersebut mengurangi kekuatan SPSI PT. Maspion. Saya tidak tahu bagaimana kapasitas pembelaan FSPSI atau organisasi mitranya, tetapi saya yakin kapasitas pendidikan social politik dari FSPSI memang kurang. Sehingga SPSI masih membutuhkan hubungan dengan LSM perburuhan di daerah dengan cara penyatuan aliran yang berbeda. Hal ini merupakan salah satu tantangan baru untuk membangun solidaritas antar gerakan buruh daerah.

Kondisi hubungan solidaritas antara para pengurus dan LSM perburuhan menjadi lebih kritis lagi karena sebagian besar pengurus SPSI PT. Maspion dalam pemilu 2004 lalu mendukung Partai Patriot Pancasila yang dipimpin oleh Yapto Suryo Sumarno, Ketua Pemuda Pancasila yang terkenal sebagai “preman” dan sangat dekat dengan militer serta keluarga Soeharto. Sugianto, misalnya, bersedia menjadi caleg (calon legislatif) nomor 1 dari Partai Patriot Pancasila di daerah pemilihan Sidoarjo. Tetapi mimpi Sugianto untuk bisa masuk DPRD Jawa Timur tidak berhasil. Sugianto hanya mendapat suara sebanyak 116 (0,09 %) dari 135.459 jumlah suara yang seharusnya dia peroleh jika ingin duduk di DPRD Jawa Timur. Ke-116 suara tersebut didapatkannya sebagai berikut: 83 suara di Gedongan, 25 suara di Buduran dan 8 suara di Sedati (wawancara dengan Ansori, 2 Februari 2005). Beberapa pengurus ikut membantu Sugianto dengan alasan “cari pengalaman”, tetapi para aktivis LSM tidak mengerti atau boleh dikatakan tidak mau tahu dengan tujuan pengurus. Seorang aktivis bahkan menanyakan apakah mereka yang hampir berusia 40 tersebut masih butuh mencari pengalaman tanpa melihat akuntabilitasnya?



Pemutusan hubungan solidaritas antara para pengurus SPSI Maspion dan LSM perburuhan menunjukkan gerakan serikat buruh Maspion Group tidak akan menjadi lokomotif seperti gerakan serikat buruh Hyundai Group di Korea Selatan. Setelah dimulainya demokratisasi pada tahun 1987, gerakan serikat buruh Hyundai Group menjadi sumber daya besar untuk membangun KCTU, federasi serikat buruh yang independen, sangat militan, berideologi alternatif dan mempunyai jaringan solidaritas yang sangat luas dengan gerakan sosial di Korea Selatan.

c. Reaksi Manajemen: Kembali Menyerang Pengurus Baru

Pada bulan April 2004 setelah pemilihan legislatif, saya berkunjung lagi ke Maspion Unit I bersama dengan aktifis Poengky Indarti yang mengenal para pengurus lebih lama. Akan tetapi Andy Tjandra, Direktur Sumber Daya Manusia di PT. Maspion I, melarang kami masuk kantor SPSI, meskipun Herry Supriyanto, wakil ketua SPSI, mengajukan permohonan pada Andy Tjandra untuk mengajak saya ke kantornya. Tetapi saya hanya bisa bertemu dengan para pengurus di ruang tamu yang terisolasi.

Saya mencoba masuk lagi pada Februari 2005, tapi Andy juga menolak permintaan saya untuk mengunjungi kantor SPSI tanpa surat permohonan. Saya menelepon dia untuk menanyakan alasan penolakannya dan saya sampaikan kekecewaan saya karena pengurus SPSI sudah mengajak dan menunggu saya untuk berkunjung ke tempat mereka. Tetapi Andy menjawab bahwa Kantor SPSI ada di lokasi “dalam kawasan” Maspion, sehingga saya “tidak boleh masuk seenak sendiri” tanpa mendapatkan ijinnya dan ijin dari presiden direkturnya. Karena dilarang masuk, saya terpaksa bertemu para pengurus di rumah makan yang terletak berdekatan dengan pintu gerbang Maspion. Suasananya tidak sama dengan suasana tahun 2001 - 2003.

Pada saat bertemu dengan para pengurus tersebut, saya bisa mendengar cerita baru mengenai reaksi manajemen sebagai berikut:

- 1) *Outsourcing* menjadi alasan pembenar bagi pengusaha untuk melakukan mutasi besar-besaran. Sekitar 30% dari tenaga kerja yang digunakan PT. Maspion I adalah tenaga *outsourcing* dari CV. Trimulti, CV. Kharisma, CV. Median Utama, PT. Perwita, dll.
- 2) Upah buruh Maspion memang dinaikan sesuai dengan UMK sebesar Rp. 578.500, yang sebelumnya sebesar Rp 550.700, akan tetapi kenaikan ini bukan kenaikan yang riil karena pengusaha ternyata mengurangi Tunjangan Tidak Tetap (T3) buruh dari Rp 3.800,- per-hari menjadi Rp1.900,- per-hari.



- 3) Manajemen mengancam akan melakukan mutasi dan akan menuntut ganti rugi pada SPSI jika SPSI berani mengajak anggotanya untuk mogok. Yang menjadi korban ancaman manajemen ini adalah Ketua Divisi Teflon. Ketua Divisi yang dipilih para anggotanya ini malah dipindahkan ke Unit II. Hal ini terjadi karena Divisi Teflon telah melakukan mogok spontan pada bulan Januari 2005. Setelah mogok di Divisi Teflon tidak diberi kesempatan lembur.

Buruh Maspion menduga bahwa reaksi manajemen yang keras ini adalah kebijakan dari Alim Prakasa, bukan Alim Markus yang agak paternalis. Para pengurus yang harus menghadapi reaksi manajemen adalah para pengurus baru yang dipimpin oleh Sugeng Widodo. Sugeng Widodo dkk dipilih pada tahun 2004. Sugeng dikenal sebagai “orang baik” yang tidak melakukan “tindakan yang aneh-aneh” dan lebih bisa bekerjasama dengan timnya. Sugeng Widodo juga bukan type pemimpin yang “*one man show*”, tetapi dia dikritik kurang bisa berkomunikasi dengan para pengurus yang lama.

Untuk menghadapi hal-hal yang baru, maka para pengurus baru membutuhkan strategi yang hebat, termasuk diantaranya melakukan reformasi organisasi SP, pendidikan anggota dan membentuk solidaritas dengan cara penyatuan aliran. Hal itu adalah observasi terakhir yang saya lakukan.

IV. Kesimpulan

Sumber dasar bagi gerakan buruh adalah perjuangan dan organisasi buruh di tingkat pabrik. Pada tahun 1993, buruh-buruh Maspion Unit I melakukan unjuk rasa militan dan panjang selama 17 hari tetapi tetap gagal mengganti para pengurus SPSI yang dikuasai oleh pihak manajemen. Sehingga unjuk rasa pada waktu itu dapat dianggap sebagai ‘perlawanan tanpa organisasi’. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa gerakan buruh Indonesia pada waktu itu hanya dilakukan oleh LSM perburuhan domestik maupun internasional yang dilakukan oleh aktivis kelas menengah, sehingga gerakan perburuhan saat itu adalah gerakan kelas menengah. Jika berbicara mengenai aliansi kelas dalam kasus ini, maka aliansi itu menurut saya tidak seimbang karena posisi buruhnya rendah, seperti karyawan kontrak atau pembantu saja.

Tetapi unjuk rasa buruh Maspion pada masa pasca rezim Soeharto telah melahirkan organisasi dari tingkat pabrik, yaitulah ‘perlawanan dengan organisasi’ dan membawa hasil positif bagi demokratisasi terhadap buruh. Sehingga saya berpendapat bahwa gerakan buruh oleh kelas buruh atau berdasarkan kaum buruh yang terorganisir di Indonesia mulai bangkit pada tahun



1998. Buruh Maspion berani maju ke barisan depan pada waktu itu. Pemogokan selama satu minggu pada bulan Juni 1998 – atau terjadi dua minggu setelah lengsernya Soeharto - adalah kejadian tak terduga yang telah mewartakan kebangkitan kepemimpinan buruh yang mempunyai kapasitas mobilisasi lebih dari 20 ribu massa. Mereka berani menekan manajemen hingga bersedia mengabulkan tuntutan mereka, dan melakukan pengambilalihan kepemimpinan PUK SPSI. Dalam pemilihan langsung oleh para anggota yang berlangsung demokratis di tahun 2001, mereka terpilih kembali untuk menjabat menjadi pengurus.

Mereka tidak memerdulikan bahwa SPSI adalah bagian dari struktur organisasi lama, dan hanya mencari cara yang efisien untuk dapat memfokuskan diri pada perlindungan kepentingan mereka. Selanjutnya, mereka menggunakan strategi *syncretism* (penyatuan Aliran) antara Federasi SPSI dan LSM perburuhan agar dapat memperkuat perlindungan terhadap organisasi mereka. Untuk dapat bersaing dengan SB-SB lain, mereka meneruskan kebijakan iuran minimalis. Strategi tersebut dapat menjadi alat perlindungan yang hemat, akan tetapi justru sekaligus menjadi hambatan bagi buruh Maspion untuk dapat berperan lebih besar lagi bagi reformasi di luar kepentingan internal mereka, sebagaimana yang terjadi pada gerakan serikat buruh di Korea.

Gerakan buruh Surabaya dan Jawa Timur tidak begitu merespon kepemimpinan SPSI Maspion pada saat ini dengan alasan nama organisasi (masih tetap menggunakan nama SPSI yang merupakan symbol *pro status quo*), dan adanya sekat pembatas antar LSM, misalnya buruh dianggap sebagai wilayah kavlingan LSM, sehingga antar sesama LSM ada etika untuk tidak boleh saling menyeroobot buruh yang bukan menjadi garapannya.

Saat ini sudah muncul tekanan dari manajemen yaitu dengan cara menggunakan tenaga buruh kontrak dan intimidasi langsung terhadap kepemimpinan baru. Panggung lain bagi kepemimpinan SPSI PT. Maspion adalah perubahan mereka dari upaya mobilisir massa menuju pengorganisir massa yang mempunyai akuntabilitas.

Namun demikian, kepemimpinan buruh Maspion tidak hanya berpengaruh di dalam perusahaan Maspion sendiri, tetapi juga mempengaruhi gerakan buruh daerah, antara lain dalam soal UMR (Upah Minimum Regional) dan regenerasi kepemimpinan DPC FSPSI. Kegiatan mereka dapat menjadi tantangan bagi gerakan buruh yang berpusat pada kalangan elit (*elite-centered*) di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa buruh mempunyai kesempatan untuk membangun sendiri gerakannya (gerakan buruh yang dibangun sendiri oleh kaum buruh).



Berdasarkan sejarah perjuangan buruh Maspion, saya mengusulkan agar kita jangan menduga terlalu berlebihan pada kapasitas buruh yang belum independen secara organisasi sebagaimana yang terjadi pada masa rezim Soeharto, dan sebaliknya, kita juga jangan terlalu kecewa pada kapasitas buruh pada masa Pasca-Soeharto. Atau dengan kata lain kita jangan sampai melebarkan hipotesis bahwa “rakyat Indonesia bodoh”. Jika ada yang bersedia melakukan aliansi kelas antara kelas menengah dan kelas buruh, maka saat ini adalah saat yang tepat untuk membangun dengan cara melakukan komunikasi terbuka dan saling belajar antara kepemimpinan buruh dan tokoh-tokoh LSM. Selanjutnya, haruslah dipikirkan bersama dimana akan diletakkan ruang bagi kepemimpinan buruh yang baru muncul. Hal ini sangat membutuhkan adanya keterbukaan dari semua pihak dan re-orientasi terhadap gerakan buruh di masa lalu.

Referensi

Athreya, Bama

1998 "Economic Development and Political Change in a Workers' Community in Jakarta, Indonesia." Ph.D. Dissertation. Department of Anthropology. The University of Michigan.

CIC

1997 Indonesian Manufacturers Directory 1997/1998 Vol. I. Jakarta: CIC Indonesia Consult Inc.

Detikworld. 28 November 2000.

Hadiz, Vedi R.

1993 "Workers and Working Class Politics in the 1990s." Chris Manning and Joan Hardjono. eds.. *Indonesia Assessment 1993 - Labour: Sharing in the Benefits of Growth?* Department of Political and Social Change. Research School of Pacific Studies. Canberra: Australian National University.



- 1994 "The Political Significance of Recent Working Class Action in Indonesia." David Bouchier. ed.. *Indonesia's Emerging Proletariat: Workers and Their Struggles*. Annual Indonesia Lecture Series No. 17. Monash University.
- 1997 *Workers and the State in New Order Indonesia*. London and New York: Routledge.
- 2001 "New Organising Vehicles in Indonesia: Origins and Prospects." Jane Hutchison and Andrew Brown. eds.. *Organising Labour in Globalizing Asia*. London and New York: Routledge.
- 2002a "Globalization, Labour, and Economic Crisis: Insights from Southeast Asia." *Asian Business & Management* 1.
- 2002b "The Indonesian Labour Movement: Resurgent or Constrained?" *Southeast Asian Affairs* 2002. Singapore: ISEAS.
- Hirschsohn, Philip
- 1998 "From Grassroots Democracy to National Mobilization: COSATU as a Model of Social Movement Unionism." *Economic and Industrial Democracy*. 19.
- Jakarta Post*. 29 November 2000.
- Jawa Pos*. 5, 10 Juni, 27 Juli, 26, 27, 28 November 1998; 15, 19, 24 Februari 1999; 8 Agustus 2000.
- Kammen, Douglas Anton
- 1997 "A Time to Strike: Industrial Strikes and Changing Class Relations in New Order Indonesia." Ph.D. Dissertation, Cornell University.
- Kompas*. 28 Juli 1993.
- LBHS(Lembaga Bantuan Hukum Surabaya).
- 1998 "Kronologis: Unjuk Rasa Buruh Maspion I-V dan Tewasnya Lasimo." *Paralegal*. 13.
- Memorandum*. 27 Juli 1993; 5, 4 Juni 1998.
- Pengadilan Tinggi Jawa Timur
- 1995 "Putusan dalam Perkara Banding Pidana Terdakwa Rudy dkk."
- PT. Maspion
- 2001 *Berita Maspion: Siap Bersaing di Era Globalisasi*. 59 (September).
- n.d. *Maspion, Indonesia's Achievement*. Company Profile.
- PUK FSPSI PT.Maspion I.
- 2001 *Pertanggung Jawaban Pengurus: Periode 1998 s/d 2001*.



2004a Laporan Pimpinan Unit Kerja SP LEM SPSI PT.Maspion I Gedongan Sidoarjo Priode Tahun 2001 – 2004.

2004b Job Description dan Pedoman Susunan Komposisi Pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Maspion Periode Tahun 2004 - 2007.

Republika. 28 November 1998.

Suparman. n.d.. "Kronologis Karyawan PT. Maspion Unit I."

Surabaya Post. 27, 29 Juli; 3, 6, 14 Agustus 1993; 6, 10 Juni, 28 November 1998; 17 Maret 2001.

Surya. 10 Juni, 20, 21, 24, 25, 28 Juli, 3, 5, 7, 8, 12, 15, 18 Agustus 1993; 9, 10 Juni 1998; 10, 11, 18 Februari 1999; 22 April 2000.

Tempo. 11 Desember 2000.

Daftar Wawancara

Anam (Laki-laki: L). Aktivis Bidang Perburuhan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya sampai tahun 2002. Januari 2001, dll.

Andy Chandra (L). Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia, PT. Maspion I, 6 Juli 2000, dll.

Ansori (L). Anggota KPU (Komite Pemilihan Umum) Sidoarjo, 2 Februari 2005.

Edi Supriantono (L). Ketua PUK SPSI PT. Indal Maspion selama tahun 1998-2004, Pemimpin mogok di tahun 1998. 16 Maret 2001, dll.

Herry Supriyanto (L). Ketua Divisi Teflon dan Wakil Ketua PUK SPSI PT. Maspion I selama tahun 1998-2004, Januari 2003 dan April 2004 dll.

Maryono (L). Mantan Ketua PUK SPSI PT. Alumindo Maspion. Pemimpin mogok di tahun 1998. 16 Maret 2001, dll.

Poengky Indarti (Perempuan: P). Mantan Kepala Divisi Perburuhan LBH Surabaya. Juni 2000, dll.

Rommy Ceha (L). Directur Wakil PT. Alumindo Maspion. 20 Juni 2000.

Sri (P, nama samaran). Anggota SPSI Maspion Unit I. Buruh Divisi Teflon. Peserta mogok di tahun 1993 dan 1998. 16 Maret 2001 dan 17 Januari 2003, dll.

Sudarto (L). Mantan Kepala Bidang Perburuhan LBH Surabaya. Juni 2000 dll.

Sugeng (L). Ketua PUK SPSI PT. Maspion I. Februari 2005.

Sugianto (L). Mantan Ketua PUK SPSI PT. Maspion I. Pemimpin mogok di tahun 1998. 20 Juni 2000, dll.

Surono (L). Mantan Ketua Divisi Enamel dan Wakil Ketua PUK SPSI PT. Maspion I. Pimpinan mogok 1998. 16 Maret 2001, dll.



